

## KAJIAN KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN DANA DESA

**Annafi Indra Tama**

Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi

e-mail: annafi.indratama8@gmail.com

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the differences in financial independence of the East Java provincial government before and after the village fund policy from 2013-2016. The method used in this study is descriptive analysis using secondary data and data collection methods through documentation and literature study. Regional financial independence is measured three financial ratios were, the independence ratio, effectiveness and efficiency. Results of this study it can be seen that in measuring regional financial independence there is a significant change after the enactment of the village fund policy both from the measurement of the independence ratio, effectiveness, and regional financial efficiency. In the independence ratio has decreased after the enactment of the village fund policy, Sampang District. The effectiveness ratio shows results before village fund policy is better than after village funds. Conversely, the efficiency ratio shows better results after the village fund policy. It can also be seen in the measurement of financial independence that training is needed for local governments to be able to manage finances well and not depend on the central government.*

**Keywords:** *Regional Financial Independence, Policy of Villages*

### PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah harus mengupayakan pembangunan yang merata antara desa dan kota, akan tetapi pelaksanaan pembangunan masih dihadapkan pada permasalahan pokok pembangunan diantaranya yaitu masalah ketimpangan pembangunan. Terjadinya ketimpangan pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga pembangunan antara desa dan kota tidak merata, dan berdampak pada tingkat kemiskinan.

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ekonomi daerah merupakan suatu jawaban yang logis dan juga sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa.

Hal yang mendasari munculnya kebijakan dana desa yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan momentum untuk meningkatkan otonomi desa dimana juga UU Desa sejalan dengan Visi dan Misi pemerintahan Jokowi yang tercakup dalam program Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan Desa.

Namun, sejak mulai dikucurkannya dana desa tahun 2015 tidak sedikit pula penyalahgunaan

atas dana desa tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa semakin menjamur. Pada tahun 2015 setidaknya ada 17 kasus, jumlah ini meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016 dan 96 kasus pada tahun 2017.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang perlu dilakukannya penelitian terkait dengan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Dana Desa pada Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan menghitung rasio-rasio kemandirian keuangan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Gambar 1). Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

**Gambar 1**  
**Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**



Keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat (1) adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang mana rancangan ini memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No. 114 Tahun 2014).

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014, berikut beberapa rencana kegiatan yang dapat dimasukkan dalam rancangan RPJMDesa.

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:
  - a) Penetapan dan penegasan batas desa.
  - b) Pendataan desa.
  - c) Penyusunan tata ruang desa.
  - d) Penyelenggaraan musyawarah desa.
  - e) Pengelolaan musyawarah desa.
  - f) Penyelenggaraan perencanaan desa.
  - g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.
  - h) Penyelenggaraan kerja sama antar desa.
  - i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.
  - j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain:
  - a) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain: jalan pemukiman; jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikro hidro; lingkungan pemukiman masyarakat desa; dll.
  - b) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain: air bersih berskala

- desa; sanitasi lingkungan; pelayanan kesehatan desa; dll.
- c) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain: taman baca masyarakat; pendidikan anak usia dini; dll.
  - d) Pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain: pasar desa; pembentukan dan pengembangan BUMDesa; pembibitan tanaman pangan; dll.
  - e) Pelestarian lingkungan hidup, antara lain: penghijauan; pembuatan terasering; pembersihan daerah aliran sungai; dll.
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain:
- a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
  - b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
  - c) Pembinaan kerukunan umat beragama.
  - d) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
  - e) Pembinaan lembaga adat.
  - f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
  - g) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain:
- a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.
  - b) Pelatihan teknologi tepat guna.
  - c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa.
  - d) Peningkatan kapasitas masyarakat antara lain: kader pemberdayaan masyarakat desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan; kelompok tani; dll.

Dalam pelaksanaannya sesuai Permendagri No. 114 Tahun 2014, kepala desa yang menyelenggarakan penyusunan RPJM wajib mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program, dan kegiatan kabupaten/kota.

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2017) tim penyusun RPJMDesa dibentuk oleh kepala desa yang terdiri dari:

- a) Kepala desa selaku pembina;
- b) Sekretaris desa selaku ketua;
- c) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan

- d) Anggota yang berasal dari perangkat desa.

### Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, tanggung jawab atas pelaksanaan APBN/APBD ada pada entitas pelaporan. Setiap entitas pelaporan memiliki dua entitas akuntansi, yaitu sebagai bendahara umum (BUD/PPKD) dan sebagai pengguna anggaran (SKPD).

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim 2008 dalam Prastiwi,dkk 2014 kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2008), Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah merupakan bagian dari alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2007).

#### 2) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2007). Semakin tinggi rasio efektivitas,

menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan.

### 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa belanja yang dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan (Tama, 2014 dalam Halim, 2006).

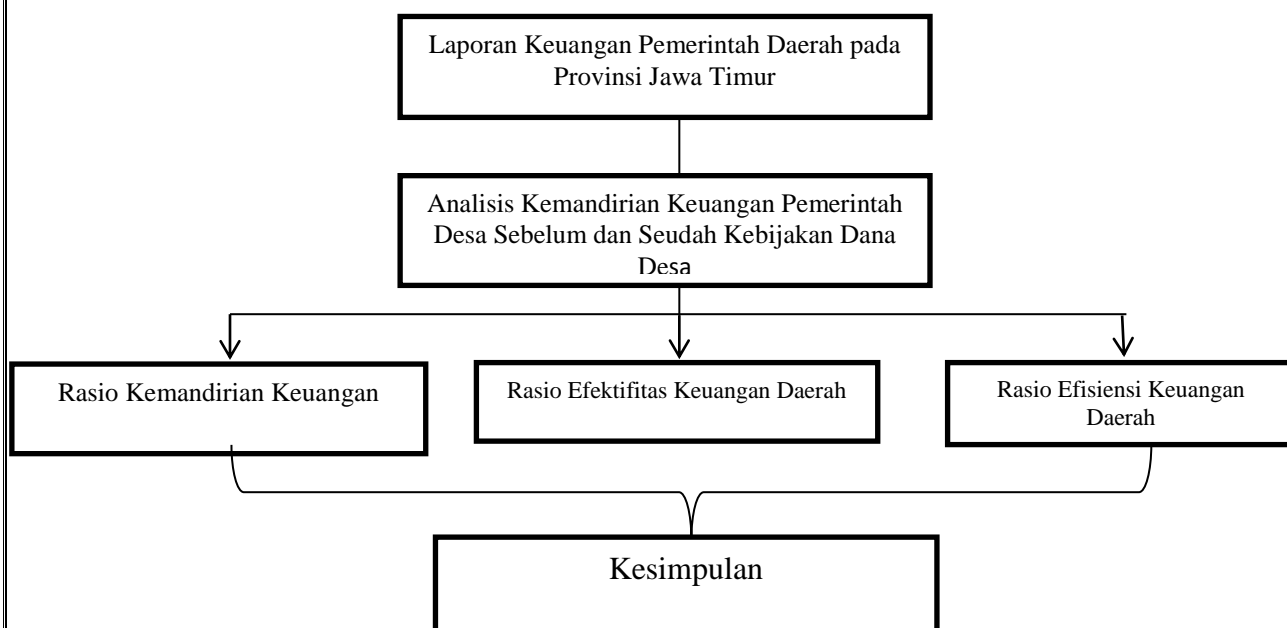
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota se-Indonesia sebelum penerapan UU No.28 Tahun 2009 dibanding sesudah penerpaan UU No.28 Tahun 2009. Setelah mengetahui perbedaan kemandirian keuangan Pemerintah Desa dan efisiensi serta efektivitas kemandirian kauengan Pemerintah Desa maka dapat menarik kesimpulan atas dampak diberlakukannya kebijakan tersebut (Gambar 2).

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua variabel atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kontribusi pajak daerah, dan rasio kontribusi retribusi daerah.

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007). Adanya perubahan Undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana adanya sebagian pajak yang sebelumnya dipungut oleh Pemerintah Pusat namun kali ini dialihkan sepenuhnya untuk memungut oleh Pemerintah Daerah maka pendapatan pajak dan retribusi daerah akan meningkat. Semakin besar pajak yang daerah yang diterima oleh daerah, maka semakin besar pendapatan asli daerah, dan semakin besar pula kemandirian suatu daerah.

**Ha: Tingkat kemandirian keuangan daerah sesudah kebijakan dana desa lebih tinggi.**

**Gambar 2**  
**Kerangka Berpikir**



Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data hasil laporan pemeriksaan pada Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, 10210.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 29 sampel yaitu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif, teknik analisis yang dilakukan dengan cara memperoleh data dari BPK RI dan menganalisis kemandirian keuangan Pemerintah Daerah penulis melakukan hal berikut:

- Kemandirian keuangan desa dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan;
- Efisiensi Keuangan Desa dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan;
- Efektivitas keuangan dana desa dengan menggunakan rasio efektivitas keuangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah adanya kebijakan dana desa.

Untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan, maka ada 3 (tiga) pengukuran rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerahnya, yaitu terdiri dari:

- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengungkapkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengandalkan bantuan Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan.

Berdasarkan hasil analisa dari Tabel 1 bahwa kabupaten di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan pada kemandirian keuangan daerahnya namun ada satu kabupaten yang mengalami penurunan sejak diberlakukannya kebijakan dana desa yaitu

pada Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebelum diberlakukannya kebijakan dana desa mengalami rata-rata persentase kemandirian mencapai 8,83 %, namun sejak diberlakukannya dana desa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 kabupaten ini mengalami penurunan pada rata-rata persentase kemandirian yaitu mencapai 8,77%. Dilihat dari kategori kemandirian keuangan daerah yang terdapat pada Tabel 1, Kabupaten Sampang masih dalam kategori instruktif sampai tahun 2016 karena kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait penggunaan dana desa banyak terjadi kelalaian dan adanya dugaan pungutan liar penggunaan Dana Desa sebesar 7,5% di salah satu desa di Kabupaten Sampang (Hariyanto, 2017).

Secara keseluruhan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya pada Kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini mengalami peningkatan. Rata-rata keseluruhan kemandirian keuangan kabupaten di provinsi ini sebelum adanya kebijakan dana desa yaitu sebesar 14, 79% sedangkan sesudah adanya kebijakan dana desa yaitu sebesar 17,41%.

Menurut hasil uji beda paired sample t test pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sig. 2 tailed sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Dari hasil tersebut, kemandirian keuangan daerah menggambarkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah kebijakan dana desa pada kabupaten di Jawa Timur. Perbedaan kemandirian tersebut secara rata-rata juga disimpulkan meningkat dibandingkan sebelum kebijakan dana desa. Ini dapat dilihat rata-rata (*mean*) daripada setiap daerah. dimana dari 29 daerah seluruhnya menunjukkan arah peningkatan kemandirian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dimana hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah kebijakan dana desa di kabupaten se-jawa timur.

**Tabel 1**  
**Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah**

Nama Kabupaten	Sebelum Kebijakan	Sesudah Kebijakan	Selisih	Keterangan
	2013-2014 (%)	2015-2016 (%)		
Bangkalan	8,82	11,79	2,97	Meningkat
Banyuwangi	12,51	15,74	3,23	Meningkat
Blitar	9,83	11,33	1,5	Meningkat
Bojonegoro	12,87	13,01	0,14	Meningkat
Bondowoso	9,01	10,13	1,12	Meningkat
Gresik	42,63	45,06	2,43	Meningkat
Jember	17,02	18,67	1,65	Meningkat
Jombang	16,64	22	5,36	Meningkat
Kediri	14,79	16,27	1,48	Meningkat
Lamongan	14	20,03	6,03	Meningkat
Lumajang	12,06	14,87	2,81	Meningkat
Madiun	8,86	11	2,14	Meningkat
Magetan	9,17	11,61	2,44	Meningkat
Malang	13,73	16,36	2,63	Meningkat
Mojokerto	21,89	27,36	5,47	Meningkat
Nganjuk	13,6	17,5	3,9	Meningkat
Ngawi	9,99	11,44	1,45	Meningkat
Pacitan	8,07	10,37	2,3	Meningkat
Pamekasan	11,04	11,81	0,77	Meningkat
Pasuruan	21,18	23,02	1,84	Meningkat
Ponorogo	11,97	13,7	1,73	Meningkat
Probolinggo	11,37	13,24	1,87	Meningkat
Sampang	8,83	8,77	-0,06	Menurun
Sidoarjo	50,2	58,33	8,13	Meningkat
Situbondo	9,45	12,26	2,81	Meningkat
Sumenep	9,18	10,75	1,57	Meningkat
Trenggalek	8,6	12,2	3,6	Meningkat
Tuban	18,54	20,88	2,34	Meningkat
Tulungagung	13,19	15,29	2,1	Meningkat
<b>Rata-rata</b>	<b>14,79</b>	<b>17,41</b>	<b>2,62</b>	<b>Meningkat</b>

**Sumber:** Badan Pemeriksaan Keuangan RI dan data diolah (2018).

**Tabel 2**  
**Uji Paired Sample t-test**

		Paired Differences			95% Confidence Interval				Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	of the Difference		t	df	
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum - Sesudah	-2.61207	1.77751	.33007	-3.28820	-1.93594	-7.914	28	.000

Sumber: SPSS 17.0

## 2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Analisis ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas keuangan daerah dihitung dengan membagi jumlah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun yang bersangkutan dan dikalikan dengan 100%. Suatu desa dapat dikatakan efektivitas terhadap kinerja keuangan daerahnya apabila pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk desa tersebut. Desa yang sudah dapat dikatakan efektif pada keuangan daerahnya yaitu desa yang rata-rata persentase rasio efektivitasnya sudah melebihi 80% sesuai dengan yang telah diuraikan pada Tabel 3 mengenai kriteria efektivitas keuangan desa.

Berdasarkan hasil analisa dapat dilihat dalam Tabel 3 bahwa pada tingkat keefektivitasan keuangan daerah pada Provinsi Jawa Timur ini kabupaten yang mengalami tingkat efektivitas keuangan daerah yang lebih tinggi terdapat pada Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 kabupaten ini termasuk dalam kategori sangat efektif dalam keuangan daerahnya sesuai dengan rata-rata pada tahun yang bersangkutan sebesar 120,92%, artinya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Tulungagung telah membuktikan bahwa rata-rata realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten ini lebih besar dibandingkan

dengan target atau anggaran pendapatan asli daerah yang ditargetkan pada tahun tersebut. Sedangkan untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sesudah diberlakukannya kebijakan dana desa, kabupaten ini mengalami peningkatan yaitu rata-rata menjadi 123,01% dan masih didalam kategori yang sama dengan sebelum adanya kebijakan dana desa.

Secara keseluruhan, tingkat efektivitas pada seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini mengalami penurunan. Pada tahun sebelum kebijakan dana desa diberlakukan, efektivitas keuangan daerah di seluruh kabupaten ini sebesar 112,53% sedangkan pada tahun sesudah diberlakukannya kebijakan dana desa rata-rata efektivitas seluruh kabupaten ini menjadi 108,95%.

Menurut hasil uji beda paired sample t test pada Tabel 4 menunjukkan bahwa sig. 2 tailed sebesar 0.059 yang artinya lebih besar dari 0.05. Dari hasil tersebut, efektivitas keuangan daerah menggambarkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah kebijakan dana desa pada kabupaten di Jawa Timur. Perbedaan kemandirian tersebut secara rata-rata juga disimpulkan meningkat dibandingkan sebelum kebijakan dana desa. Ini dapat dilihat rata-rata (*mean*) daripada setiap daerah. dimana dari 29 daerah adanya perbedaan dari masing-masing daerah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dimana hasil penelitian menunjukkan bahwasanya tidak terdapat perbedaan efektivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah kebijakan dana desa di kabupaten se-jawa timur.



**Tabel 3**  
**Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Nama Kabupaten	Sebelum Kebijakan	Sesudah Kebijakan	Selisih	Keterangan
	2013-2014 (%)	2015-2016 (%)		
Bangkalan	104,17	103,82	-0,35	Menurun
Banyuwangi	116,36	109,28	-7,08	Menurun
Blitar	113,3	107,94	-5,36	Menurun
Bojonegoro	110,58	108,8	-1,78	Menurun
Bondowoso	104,16	110,32	6,16	Meningkat
Gresik	102,82	87,98	-14,84	Menurun
Jember	94,43	95,9	1,47	Meningkat
Jombang	113,19	111,69	-1,5	Menurun
Kediri	122,96	109,73	-13,23	Menurun
Lamongan	105,02	104,84	-0,18	Menurun
Lumajang	115,45	119,27	3,82	Meningkat
Madiun	113,59	101,32	-12,27	Menurun
Magetan	114,82	107,89	-6,93	Menurun
Malang	129,63	120,14	-9,49	Menurun
Mojokerto	106,94	100,7	-6,24	Menurun
Nganjuk	113,13	113,31	0,18	Meningkat
Ngawi	128,76	114,4	-14,36	Menurun
Pacitan	113,78	116,9	3,12	Meningkat
Pamekasan	123,86	118,28	-5,58	Menurun
Pasuruan	120,95	105,9	-15,05	Menurun
Ponorogo	117,28	106,71	-10,57	Menurun
Probolinggo	120,05	108,01	-12,04	Menurun
Sampang	100,29	108	7,71	Meningkat
Sidoarjo	108,53	109,11	0,58	Meningkat
Situbondo	109,39	105,8	-3,59	Menurun
Sumenep	107,23	107,31	0,08	Meningkat
Trenggalek	101,6	112,49	10,89	Meningkat
Tuban	110,27	110,79	0,52	Meningkat
Tulungagung	120,92	123,01	2,09	Meningkat
<b>Rata-rata</b>	<b>112,53</b>	<b>108,95</b>	<b>-3,58</b>	<b>Menurun</b>

**Sumber:** Badan Pemeriksaan Keuangan RI dan data diolah (2018).



**Tabel 4**  
**Uji Paired Sample t-test**

		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum - Sesudah	6.88310	18.83288	3.49718	-.28054	14.04675	1.968	28	.059

Sumber: SPSS 17.0

### 3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah sesuai dengan apa yang direncanakan. Rasio efisiensi keuangan daerah dihitung dengan membagi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan biaya pemungutan pendapatan asli daerah atau biaya operasi daerah pada tahun yang bersangkutan dan dikalikan 100%. Desa ini dapat dikatakan efisien dalam kinerja keuangan daerahnya apabila rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerahnya kurang dari 100%, yang artinya pemerintah daerah mampu menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan sehingga desa tersebut lebih banyak menerima pendapatan yang bersumber dari desa dibandingkan dengan pengeluaran biaya operasional desa tersebut.

Berdasarkan analisa, dapat dilihat pada Tabel 5 bahwa 29 kabupaten di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dalam efisiensi keuangan daerahnya, namun kabupaten-kabupaten ini masih dalam kategori tidak efisien dalam kriteria tingkat efisiensi keuangan daerah. Artinya, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur masih belum dapat meminimalisir biaya operasi setiap kabupaten agar tidak jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya. Tetapi jika dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya kebijakan dana desa kepala desa dan perangkat desa lain pada kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini telah

mengalami perubahan kearah yang lebih baik dengan jauh lebih meminimalisir biaya operasinya.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi pada seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebelum adanya kebijakan dana desa yaitu sebesar 764,30% dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sesudah diberlakukannya kebijakan dana desa tingkat efisiensi seluruh kabupaten rata-rata menjadi 569,19% walaupun masih dalam kategori tidak efisien.

Menurut hasil uji beda paired sample t test pada Tabel 6 menunjukkan bahwa sig. 2 tailed sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Dari hasil tersebut, Efisiensi keuangan daerah menggambarkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah kebijakan dana desa pada kabupaten di Jawa Timur. Perbedaan Efisiensi tersebut secara rata-rata juga disimpulkan meningkat dibandingkan sebelum kebijakan dana desa. Ini dapat dilihat rata-rata (*mean*) daripada setiap daerah. dimana dari 29 daerah seluruhnya menunjukkan arah peningkatan Efisiensi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dimana hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan Efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah kebijakan dana desa di kabupaten se-jawa timur.

**Tabel 5**  
**Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Nama Kabupaten	Sebelum Kebijakan	Sesudah Kebijakan	Selisih	Keterangan
	2013-2014 (%)	2015-2016 (%)		
Bangkalan	1065,61	650,63	414,98	Meningkat
Banyuwangi	710,43	538,33	172,1	Meningkat
Blitar	922,99	630,24	292,75	Meningkat
Bojonegoro	719,85	525,23	194,62	Meningkat
Bondowoso	1067,73	803,31	264,42	Meningkat
Gresik	264,66	219,21	45,45	Meningkat
Jember	547,47	511,11	36,36	Meningkat
Jombang	564,07	445,6	118,47	Meningkat
Kediri	555,28	472,57	82,71	Meningkat
Lamongan	709,34	572,39	136,95	Meningkat
Lumajang	795,16	601,36	193,8	Meningkat
Madiun	1014,28	718,61	295,67	Meningkat
Magetan	972,68	738,05	234,63	Meningkat
Malang	632,41	508,63	123,78	Meningkat
Mojokerto	458,76	329,82	128,94	Meningkat
Nganjuk	663,92	476,21	187,71	Meningkat
Ngawi	920,29	705,96	214,33	Meningkat
Pacitan	1157,15	698,97	458,18	Meningkat
Pamekasan	901,23	645,02	256,21	Meningkat
Pasuruan	452,07	377,49	74,58	Meningkat
Ponorogo	841,33	610,04	231,29	Meningkat
Probolinggo	844,78	689,22	155,56	Meningkat
Sampang	983,27	700,37	282,9	Meningkat
Sidoarjo	213,86	185,46	28,4	Meningkat
Situbondo	944,17	686,78	257,39	Meningkat
Sumenep	1026,61	884,25	142,36	Meningkat
Trenggalek	1021,09	661,46	359,63	Meningkat
Tuban	478,9	396,85	82,05	Meningkat
Tulungagung	715,24	523,19	192,05	Meningkat
<b>rata-rata</b>	<b>764,3</b>	<b>569,19</b>	<b>195,11</b>	<b>Meningkat</b>

**Sumber:** Badan Pemeriksaan Keuangan RI, dan data diolah (2018).

**Tabel 6**  
**Uji Paired Sample t-test**

		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum – Sesudah	195.1127	108.00550	20.05612	154.0296	236.19585	9.728	28	.000
		6			6				

Sumber: SPSS 17.0

### SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian pada tingkat Efisiensi keuangan daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan dana desa di Provinsi ini mengakibatkan peningkatan pada tingkat Efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, meskipun terdapat salah satu kabupaten yang mengalami penurunan Efisiensi.
2. Hasil penelitian pada tingkat efektivitas keuangan daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan dana desa di provinsi ini pemerintah daerah termasuk dalam kriteria sangat efektif dalam mengelola keuangannya walaupun secara keseluruhan rata-rata tingkat keefektifitasan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sesudah adanya kebijakan dana desa.
3. Hasil penelitian pada tingkat efisiensi keuangan daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan dana desa di provinsi ini keuangan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan dalam tingkat efisiensi. Namun, peningkatan rata-rata efisiensi sesudah adanya kebijakan dana desa belum merubah kriteria pemerintah daerah dan masih dalam kriteria tidak efisien.

### Saran

1. Pemerintah daerah lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan dana desa yang berlaku di Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten sampang agar tidak terjadi kelalaian dan pungutan liar atas dana desa tersebut.
2. Pemerintah daerah lebih meningkatkan tingkat efektivitas khususnya pada kabupaten yang mengalami penurunan sesudah diberlakukannya kebijakan dana desa dengan cara melakukan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa nya.
3. Pemerintah daerah lebih meningkatkan tingkat efisiensi keuangan daerahnya agar meminimalisir biaya operasi atau biaya pemungutan pendapatan asli daerah sehingga pendapatan asli daerah yang diterima oleh kabupaten lebih besar dibandingkan biaya operasi yang harus dikeluarkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- , Kemenkeu. *Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. 2017. <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Paparan-Kemenkeu.pdf> (Diakses pada tanggal 18 Mei 2018) [www.ciburial.desa.id](http://www.ciburial.desa.id) (Diakses pada tanggal 25 Mei 2018)
- , Peraturan Pemerintah Nomor 22 Pasal 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pengalokasian Dana Desa.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa

- , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Ghozali, dkk (2012) "Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan APBD." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2 No.1 pp. 201-210. Diakses tanggal 14 maret 2014, dari e-jurnal.undip.ac.id
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP Undip: Semarang
- Halim, Abdul, 2008. *Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. 127-146.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN
- \_\_\_\_\_, 2002. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI Yogyakarta: Yogyakarta.
- Ramadhani, Febby Randria. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. Skripsi (diterbitkan)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.
- Riyani, Nunuk. *Analisis Pengelolaan Dana Desa. Skripsi (diterbitkan)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Tangkumahat, Panelewen, dan Mirah. "Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa", *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi*. Juli 2017, Vol. 13, No. 2A, hal. 335-342
- Yuliansyah dan Rusmianto. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat, 2017
- <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf> (Diakses pada tanggal 8 juli 2018)
- <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabbimkonkeudesas.pdf> (Diakese pada tanggal 8 juli 2018)
- [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2018)